

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan suatu negara untuk menjadi lebih baik dari aspek kehidupan merupakan cita-cita dan sekaligus harapan bagi seluruh rakyat yang bernaung di dalamnya. Untuk dapat mewujudkan cita-cita itu maka seluruh komponen yang ada harus bekerjasama dalam satu komando yang biasanya diperankan oleh pemerintah. Namun tidak jarang dalam merumuskan strategi perjuangan yang diambil oleh pemerintah tidak sesuai dengan strategi yang dipakai oleh kelompok yang masih bagian dari negara tersebut. Maka dalam hal ini pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam menentukan masa depan negara harus tegas mengambil sikap untuk menentukan jalan terbaik bagi masa depan negerinya.

Dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari penjajah mulai dilaksanakan oleh rakyat Indonesia guna merebut kekuasaan dan menegakkan kedaulatan negara proklamasi. Sesudah proklamasi 17 Agustus 1945 terjadilah pertempuran dan bentrokan-bentrokan antara pemuda-pemuda Indonesia melawan aparat kekuasaan Jepang. Tujuannya adalah untuk merebut kekuasaan guna menegakkan kedaulatan Republik serta untuk

memperoleh senjata sebagai alat perjuangan apabila suatu saat terjadi serangan dari pihak luar yang ingin kembali menguasai Indonesia.

Pasca revolusi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 peran pemuda semakin nyata terlihat, pemuda yang berjiwa nasionalisme tinggi tergerak untuk mengatur dan menjalankan sistem pemerintahan negaranya sendiri. hal ini dikarenakan pemuda mempunyai kesadaran untuk merubah nasib bangsanya yang lama terbalenggu penjajah.

Belum sempat untuk menata pemerintahannya sendiri dengan baik tepatnya pada tahun 1946, ketika negara Indonesia belum genap berusia satu tahun ketika krisis politik yang hebat melanda negeri ini. Di dalam tubuh para pemimpin Indonesia sendiri ternyata ada masalah besar. Kepentingan kelompok, ketidaksabaran dalam menjalankan situasi, hilangnya rasa kawan sebangsa, serta adanya petualang politik yang tidak puas menggoyahkan pemerintahan Indonesia yang baru berjalan.

Sistem pemerintahan yang dipakai oleh bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan ialah Parlemerter dimana kekuasaan pemerintahan diperankan oleh Perdana Menteri Syahrir. Politik pemerintahan pasca proklamasi dititikberatkan pada usaha memperoleh pengakuan luar negeri atas kemerdekaan Indonesia melalui cara-cara diplomasi. Jalur diplomasi dipilih sebagai strategi perjuangan yang diambil para pemimpin Indonesia. Mereka menyadari benar bahwa tindakan perang terbuka dan besar-besaran bukan hanya akan membuktikan betapa lemahnya kekuatan militer Indonesia, melainkan juga memperlihatkan betapa bangsa ini tidak menghargai perdamaian. Bagi bangsa yang baru mengalami kehancuran akibat

penjajahan, sebuah konflik baru jelas bukan suatu pilihan yang tepat. Oleh karena itu, para tokoh politik Indonesia sebisa mungkin mempertahankan kedaulatan Indonesia dengan jalan musyawarah.

Dalam upaya mengisi kemerdekaan tersebut terdapat perbedaan dalam menentukan strategi perjuangan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Dalam hal ini strategi pemerintah adalah kompromi dengan Belanda melalui perundingan dan anjuran pendirian partai-partai politik untuk menunjukkan adanya demokrasi. Dua kebijakan ini dirumuskan dalam maklumat pemerintah pada tanggal 1 dan 3 November 1945 yang ditandatangani wakil presiden Mohammad Hatta.

Sikap protes serta kritikan terhadap pemerintah berawal dari keluarnya kebijakan pemerintah pada tanggal 1 November 1945. Dinyatakan dalam maklumat tersebut bahwa pemerintah menginginkan pengakuan terhadap negara dan pemerintah Republik Indonesia dari Serikat Belanda yang dibuat sebelum Perang Dunia II dan berjanji akan mengembalikan semua milik asing atau member ganti rugi atas milik asing yang telah dikuasai pemerintah. (Marwati Joened Posponegoro, Nugroho Notosusanto, 1990 : 128).

Sikap pemerintah itu selain kurang disetujui Angkatan Perang, juga mendapat tantangan dari golongan tertentu. Tokoh utama dari golongan ini adalah Tan Malaka. Mereka beranggapan bahwa diplomasi tidak efektif karena memberikan peluang bangsa lain kembali menguasai Indonesia terutama Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia.

Para politisi Indonesia terpecah ke dalam dua posisi. Pertama, mereka yang mendukung langkah diplomasi dengan Belanda, seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Perdana Menteri Syahrir, dan Menteri Pertahanan Amir Syarifudin. Di seberangnya, ada kelompok lain memilih opsi militer untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Tokoh-tokohnya tak kalah berpengaruh diantaranya : Tan Malaka, Iwa Kusuma Sumantri, dan Chaerul Saleh. Panglima Besar Jenderal Sudirman juga menunjukkan dukungannya kepada kelompok kedua ini. (M. Yuanda Zara, 2009 : 2)

Perjuangan rakyat dalam upaya mempertahankan kemerdekaan hendaklah tetap di atas dasar persatuan dan kerjasama dari segala golongan rakyat dengan menjunjung tinggi Republik Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya pada awal revolusi kemerdekaan perselisihan paham politik yang mendasar membuat konflik dan melahirkan upaya untuk mengganti pemerintah yang berkuasa pada saat itu.

Kekecewaan pihak oposisi memuncak setelah terpilihnya Syahrir kembali menjadi Perdana Menteri yang dianggap telah gagal mengatai krisis yang melanda Indonesia dan mengangkat menteri dari pihaknya yang menguasai posisi kunci dalam pemerintahan. Pihak oposisi mengharapkan Tan Malaka yang lebih bersikap Radikal sebagai formatur pemerintahan. (Tashadi. 1991 : 153)

Karena merasa keinginannya tidak terpenuhi para pemuda membentuk organisasi bernama Persatuan Perjuangan di bawah pimpinan Tan Malaka dan melanjutkan oposisinya terhadap pemerintah. Tan Malaka menekankan perlunya Persatuan Perjuangan dari semua orang dan semua aliran untuk melaksanakan program umum yang berintikan tuntutan perjuangan kemerdekaan Indonesia 100% dan pengusiran tentara asing dari Indonesia.

Persatuan Perjuangan berusaha mencari bantuan dari pihak militer dalam upaya pergantian kabinet. Salah satu tokoh militer yang berhasil dipengaruhi ialah Mayor Jenderal Sudarsono yang merupakan seorang perwira yang menjabat

sebagai Panglima Divisi III yang membawahi Kedu, Pekalongan, dan Yogyakarta. Keinginan Mayor Jenderal Sudarsono bergabung dengan oposisi karena permintaan pemerintah kepada Belanda agar mengakui de facto atas Jawa dan Sumatera dinilai amat merugikan Indonesia. Perjuangan dan pengorbanan rakyat seolah-olah tidak dipertimbangkan pemerintah.

Situasi politik yang terjadi pada saat itu bisa dikatakan sulit, hal ini dikarenakan kepercayaan terhadap kinerja pemerintah sudah tidak ada lagi. Dalam keadaan sulit itu pemerintah menahan para pemimpin Persatuan Perjuangan yang salah satunya Tan Malaka atas dasar pertimbangan demi menghindarkan kekacauan dalam masyarakat. Upaya penahanan ini pun tidak disetujui oleh militer karena garis perjuangan Persatuan Perjuangan sejalan dengan militer yang tanpa kompromi.

Kecewaan militer semakin besar kepada pemerintah dikala dalam organisasi kemiliteran pemerintah terlalu ikut campur. Hal ini ditunjukkan dengan ketidaksetujuan militer atas Pepolit (Pendirian Staf Pendidikan Politik Tentara), organisasi pertahanan, pengangkatan komandan-komandan dan divisi merupakan faktor tambahan atas berlangsungnya pertentangan. Hal ini menimbulkan gagasan dari salah satu perwira militer yakni Mayor Jenderal Sudarsono untuk menjatuhkan pemerintahan secara paksa dengan menculik Perdana Menteri Syahrir. (G. Moedjanto. 1998 : 167).

Mayor Jenderal Sudarsono yang memiliki wewenang untuk menjaga keamanan lalu menyusun gagasan dan usaha untuk merubah kabinet dengan menculik Perdana Menteri Syahrir. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian perintah kepada bawahannya Mayor A.K. Yusuf untuk melakukan penculikan. Atas usahanya ini Sudarsono bertanggung jawab dengan menghadap Presiden Sukarno.

Perpecahan semakin meruncing dan berujung pada Peristiwa 3 juli 1946. Pada 3 juli 1946, Mayor Jenderal Sudarsono dan beberapa tokoh militer “memaksa” Sukarno menuruti kehendak mereka. Dalam batasan tertentu kejadian ini dianggap sebagai kudeta. (M. Yuanda Zara. 2009 : 1)

Dalam peristiwa ini dapat dijadikan gambaran bahwa dalam semangat mengisi dan mempertahankan kemerdekaan sangatlah besar. Keinginan mengatur bangsa tanpa ada pengaruh bangsa asing sangat besar, hal itu ditunjukkan dengan penculikan pemimpin negara oleh bangsanya sendiri pada peristiwa 3 Juli 1946.

B. Analisis Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor penyebab bergabungnya Mayor Jenderal Sudarsono dengan Persatuan Perjuangan.
2. Usaha-usaha Mayor Jenderal Sudarsono sebagai pemimpin gerakan dalam peristiwa 3 Juli 1946.
3. Dinamika peristiwa 3 Juli dalam politik di Indonesia 1946.

2. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan yang akan diteliti tidak terlalu luas, maka masalah dalam penelitian ini akan dibatasi pada ” Usaha-usaha Mayor Jenderal Sudarsono sebagai pemimpin gerakan dalam peristiwa 3 Juli 1946”.

3. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ”Bagaimanakah Usaha-usaha Mayor Jenderal Sudarsono sebagai pemimpin gerakan dalam peristiwa 3 Juli 1946?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Usaha-usaha Mayor Jenderal Sudarsono sebagai pemimpin gerakan dalam peristiwa 3 Juli 1946.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka kegunaan dari penelitian ini:

1. Dapat memberikan pengetahuan serta wawasan khususnya dalam bidang kesejarahan yakni mengenai Usaha-usaha Mayor Jenderal Sudarsono sebagai pemimpin gerakan dalam peristiwa 3 Juli 1946.
2. Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan Ilmu Sosial pada umumnya dan Ilmu Sejarah pada khususnya tentang masalah kudeta pertama Republik Indonesia pasca kemerdekaan 1945.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat masalah di atas cukup umum dalam penelitian untuk menghindari kesalahan pahaman, maka dalam hal ini peneliti memberikan kejelasan tentang sasaran dan tujuan penelitian mencakup:

a. Ruang Lingkup objek

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah sejarah kudeta pertama Republik Indonesia.

b. Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah Usaha-usaha Mayor Jenderal Sudarsono sebagai pemimpin gerakan dalam peristiwa 3 Juli 1946 di Indonesia.

c. Wilayah / Tempat Penelitian

Wilayah/tempat penelitian ini adalah Perpustakaan Unila dan Perpustakaan Daerah Lampung.

d. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah tahun 2013.

e. Bidang Ilmu

Bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Sejarah Politik.

REFERENSI

- Nugroho Notosusanto & Marwati Djoened Poesponegoro. 1990. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Balai Pustaka. Jakarta. Halaman 128
- M. Yuanda Zara. 2009. *Peristiwa 3 Juli 1946*. Media Pressindo : Yogyakarta. Halaman 1
- Ibid.* Halaman 2
- Tashadi, dkk. 1991. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Departemen Pendidikan : Jakarta. Halaman 153
- G. Moedjanto. 1988. *Indonesia Abad Ke-20*. Kanisius : Yogyakarta. Halaman 167